

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Menurut Mardiasmo (2009:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Sedangkan efisiensi berhubungan dengan produktivitas, yaitu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang bertugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset. BPKAD selaku PPKD dan Bendahara Umum Daerah memiliki fungsi yaitu melakukan penyiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja Pemerintah Kota Padang tahun 2013-2016 yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2016 walaupun tingkat efektivitas pada tahun 2013 juga dikategorikan efektif. Tingkat efektivitas masih cukup efektif pada tahun 2014 dan 2015 karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai.
4. Tingkat atau kriteria efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Padang tahun 2013–2016, secara keseluruhan sudah diolah secara baik karena anggaran belanja tahun 2013-2016 dikategorikan sangat efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.



5. Realisasi belanja Pemerintah Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahun dilihat dari jumlah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal per tahunnya.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan tugas akhir ini, maka disampaikan saran yaitu untuk memudahkan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran belanja perlu memahami konsep belanja dengan mengkaji sektor yang produktif dan kurang produktif agar pelaksanaan anggaran belanja dalam APBD dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

